



## POLEMIK BENTOR Kembali Mencuat

● SILVY DIAN SETIAWAN

**Pengemudi bentor meminta solusi agar bisa mencari nafkah lagi di kawasan Malioboro.**

YOGYAKARTA — Polemik mengenai keberadaan becak motor (bentor) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali mengemuka. Masalah mengenai keberadaan moda transportasi ilegal tersebut memang menjadi hal yang dilematis. Di satu sisi, keberadaannya tidak legal. Namun di sisi lain, eksistensinya sudah berlangsung bertahun-tahun sehingga melarangnya sekarang sama saja berurusan dengan perut banyak orang.

Terakhir, para pengemudi bentor yang tergabung dalam Paguyuban Becak Motor Yogyakarta (PBMJ) mendatangi DPRD DIY pekan lalu. Kedatangan tersebut guna meminta kejelasan terkait pengoperasian bentor, khususnya di kawasan Malioboro.

Ketua PBMJ, Parmin (54) mengatakan, ia dan pengemudi bentor lainnya mulai susah untuk beroperasi dan mencari nafkah di Malioboro. Bahkan, mereka merasa dibedakan dengan transportasi lainnya seperti andong dan becak kayu. "Sepanjang Malioboro, tempat untuk becak motor sedikit. Sudah penuh becak dan delman. Harapannya kami bisa mengais rezeki di Malioboro," kata Parmin di Gedung DPRD DIY, Yogyakarta, Selasa (26/11).

Ia menyebut, tempat mangkal yang disediakan pun tidak cukup. Hal itu menyebabkan mereka harus mangkal di luar kawasan Malioboro. Hal itu menyebabkan pendapatan pengemudi bentor menjadi turun drastis. Pengemudi bentor yang tergabung dalam PBMJ sendiri mencapai 1.500 bentor.

"Pendapatan rata-rata Rp 30 ribu sampai Rp 50 ribu sehari. Sekarang yang di luar Malioboro cuma bisa naik satu kali saja," ujarnya.

Untuk itu, pengemudi bentor meminta solusi agar mereka bisa mencari nafkah lagi di kawasan Malioboro. Sebab, kata Parmin, mereka sudah lama mangkal di Malioboro, bahkan lebih dari 10 tahun.

Kepala Dinas Perhubungan Kota

Yogyakarta Agus Arif Nugroho mengatakan, bentor tidak dipermasalahkan untuk mangkal di Malioboro. Namun, harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan yakni dengan tidak mangkal di pinggir jalan yang ada di Malioboro. Sebab, dapat menyebabkan permasalahan lalu lintas di kawasan tersebut. Lahan untuk bentor sendiri, katanya, sudah disediakan di Malioboro.

Namun, memang tidak mencukupi untuk seluruh bentor yang ada. Lahan tersebut, disediakan juga untuk becak kayu dan andong. "Malioboro mau dipakai *ya* tidak akan cukup. Instru itu harmoninya begitu dapat penumpang,

isi lahan yang kosong (diisi oleh bentor lain yang belum mendapat penumpang). Seribu lebih bentor, Malioboro tidak akan cukup," katanya.

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudianta mengatakan, pihaknya akan berupaya menyelesaikan permasalahan bentor. Ia mengatakan, harus ada regulasi yang pasti terkait keberadaan bentor di Yogyakarta.

"Kami berkomitmen sebelum tahun ketiga (setelah dilantik), masalah bentor bisa diselesaikan di Yogyakarta," katanya.

Kawasan Malioboro sendiri direncanakan akan dijadikan sebagai sempedestrian penuh pada 2020. Untuk itu,

pembahasan masalah tersebut harus secepatnya dilakukan. "Memang Malioboro akan dijadikan kawasan pedestrian. Bagaimana nasib rekan-rekan becak dan bentor, harus dilakukan pembahasan aturannya dari sekarang," jelasnya.

Menurutnya, penyelesaian masalah bentor ini harus dimasukkan dalam perencanaan transportasi Yogyakarta. Se-

#### BENTOR DI YOGYAKARTA

Angkutan becak motor (bentor) beroperasi di kawasan Malioboro, Yogyakarta, Selasa (26/11). Angkutan becak menjadi polemik saat ini. Terutama untuk bentor. Moda transportasi tersebut belum memiliki izin operasi dan juga mengancam becak kayu sebagai ikon wisata Daerah Istimewa Yogyakarta.

hingga, nantinya dapat menghadirkan bentor yang sesuai dengan aturan. "(Penyelesaian masalah ini) harus dikawal bersama-sama. Kami siap berkomunikasi setiap saat. Tahun ketiga mudah-mudahan sudah ada langkah yang tepat," ujarnya.

Ia pun meminta Dinas Perhubungan maupun aparat kepolisian tidak menindak bentor. "Kalau melanggar marka jalan, silakan. Kalau dia bentor jangan dulu karena kita belum punya solusi saat ini," ujarnya.

Kawasan Malioboro direncanakan akan dijadikan sebagai semipedestrian penuh pada 2020 mendatang. Untuk itu, pembahasan masalah tersebut harus secepatnya dilakukan.

Saat ini, Pemkot Yogyakarta bersama Pemda DIY masih terus melakukan kajian dan evaluasi guna mematangkan konsep pelaksanaannya nanti.

"Doakan tahun terakhir ini kita sudah menemukan beberapa (konsep) yang harus bisa kita eksekusi dan (Malioboro) 2020 bisa menjadi lebih baik lagi," kata Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi.

Ia pun berharap, Malioboro menjadi kawasan semipedestrian penuh dapat terealisasi secepatnya. Yakni awal 2020 pada Januari atau paling tidak pada Februari 2020.

"*Insha Allah* (Januari atau Februari). Karena ini menyangkut pengembangan ke depan. Jadi ini harus betul-betul, jangan sampai kita melaksanakannya masih banyak hal yang bermasalah," kata Heroe. ■ ed: fernan rahadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan 2. UPT. Malioboro	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005